

DPRD Minta Pemprov DKI Antisipasi Kegagalan Proyek ITF Terulang

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta melakukan kajian mendalam sebelum merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Langkah ini diperlukan untuk mencegah terulangnya kegagalan pembangunan fasilitas pengolahan sampah seperti proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

"Kajian dari rencana perlu mumpuni agar kegagalan pembangunan pengolahan sampah dengan ITF di Jakarta tidak kembali terulang," ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf dalam keterangannya, Rabu (2/8).

Saat ini, kata Yusuf, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memutuskan untuk fokus mengembangkan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) plant.

Untuk itu, Yusuf dan para anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta berharap fasilitas RDF yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

"Sebenarnya harapan kita ITF dan RDF dua sistem pengelolaan sampah tersebut bisa berjalan. Namun kami melihat RDF ini yang sudah selesai di Bantar Gebang, dan kami akan lihat hasilnya," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan, DPRD DKI Jakarta siap mendukung rencana pembangunan RDF di dua lokasi lain, apabila fasilitas yang ada saat ini dapat berjalan dengan lancar.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan menyetop proyek ITF Sunter.

Proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik itu tidak dilanjutkan karena nilai investasi dan biaya operasionalnya terlalu besar.

"Iya (ITF tidak dilanjutkan). Ya kami kan enggak

sanggup ya," ujar Heru di TPST Bantargebang, Selasa (27/6).

Atas dasar itu, Pemprov DKI memutuskan untuk menghentikan proyek ITF dan fokus mengembangkan sistem RDF. Saat ini, RDF atau bahan bakar alternatif dari hasil pemilahan sampah perkotaan telah berhasil diproduksi di TPST Bantargebang.

"Ya investasi bisa lebih dari Rp 5 triliun. Pemda DKI bukan tidak mau, bagus-bagus semua konsep-konsep itu," kata Heru.

"ITF atau RDF bagus-bagus, tapi sekali lagi Pemda DKI tidak mampu membayar tipping fee," sambung dia.

Heru menambahkan, jajarannya akan membahas lebih lanjut penyertaan modal daerah (PMD) yang sudah telanjur dialokasikan untuk pembangunan ITF Sunter.

PMD yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo untuk pembangunan ITF sebesar Rp 577 miliar. Groundbreaking proyek ITF Sunter dilakukan oleh Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI pada 2018 lalu.

Namun, proses pembangunan proyek itu selalu tertunda karena sejumlah alasan.

Terbaru, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menegaskan, fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau ITF di Sunter, akan tetap dibangun. Hanya saja, Pemprov DKI Jakarta saat ini lebih fokus membangun fasilitas RDF sebagai sarana pengolahan sampah Jakarta.

"(Pembangunan ITF Sunter) bukan dibatalkan, tapi saat ini Pemprov DKI lebih fokus ke RDF," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (26/7) lalu. ■ yan

Akses Jalan Menuju JIS yang Menyempit Dikeluhkan Warga

JAKARTA (IM) - Akses jalan menuju Jakarta International Stadium (JIS), Sunter, Jakarta Utara masih dikeluhkan warga. Pasalnya, jalan akses tersebut masih terlihat ada penyempitan.

Adapun sebagian jalan sudah dilebarkan sepanjang 12 meter, tetapi akses jalan yang menuju stadion dari arah sekolah Jubilee (Sunter Agung) masih menyempit dengan lebar 6 meter.

Terlebih diketahui, JIS salah satu stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia U-17 pada bulan November mendatang.

Arifin (47), salah satu warga Sunter Agung mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera melakukan pelebaran jalan terhadap jalan yang menyempit tersebut.

"Saya minta Pemprov DKI harus segera melebarkan jalan yang terlihat masih menyempit agar kendaraan yang keluar masuk menuju stadion dapat lebih mudah," kata Arifin kepada awak media, Rabu (2/8).

Idealnya, dikatakan Arifin, akses masuk menuju stadion itu seharusnya 4 jalur bukan 2 jalur.

"Harusnya jalan menu-

ju stadion itu 4 jalur agar terlihat lebih besar akses jalannya, namun kenyataan di lapangan hanya 2 jalur," sambung dia.

Tak sampai di situ, Arifin juga meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk segera meninjau langsung akses jalan yang menyempit tersebut.

Ia juga menyebut, bahwa sebagian warga telah mendukung jika Pemerintah DKI melakukan pelebaran jalan pada akses menuju stadion.

"Arifin menambahkan harusnya pak Heru bisa meninjau ke lapangan untuk melihat akses jalan nya, biar bisa segera di kerjakan pelebaran nya, sebagai warga kami mendukung untuk dilakukan pelebaran mau di kerjakan kapan pun juga (pagi, siang atau malam) karena bisa mengurangi kemacetan apabila jalan dilebarkan," tuturnya.

"Kalau itu segera dikerjakan itu kan bagus sesuai arahan pak presiden Jokowi terkait permasalahan di ibukota yaitu terkait permasalahan kemacetan dan penanganan banjir," tandas Arifin menambahkan. ■ yan

4 Metropolis

FOTO: ANTARA



PELUNCURAN VAKSIN NUSAGARD

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono (tengah) bersama Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya (kedua kiri), Managing Director PT Merck Sharp & Dohme Indonesia (MSD) George Stylianou (kiri), Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito (kedua kanan), dan Asisten Deputi Industri Kesehatan Kementerian BUMN Aditya Dhanwantara (kanan) meluncurkan NUSAGARD vaksin 4-valent Human Papillomavirus (HPV) di Jakarta, Rabu (2/8). PT Bio Farma (Persero) bekerja sama dengan PT Merck Sharp & Dohme Indonesia (MSD) meluncurkan NUSAGARD vaksin 4-valent Human Papillomavirus (HPV) produksi dalam negeri untuk meningkatkan produksi vaksin di dalam negeri dan dukungan terhadap program imunisasi HPV skala nasional.

Mangkrak 5 Tahun, Revitalisasi Blok VI Pasar Senen Akhirnya Dilanjutkan

Alasan revitalisasi mangkrak hingga lima tahun, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan beralasan, hal itu disebabkan karena Covid-19 dan sejumlah masalah dengan mitra. Ya karena memang pandemi. Mitra itu beberapa juga karena kondisi keuangan.

JAKARTA (IM) - Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan menjawab sejumlah tuntutan yang disampaikan para pedagang Blok VI Pasar Senen soal revitalisasi Blok VI yang mangkrak sejak lima tahun silam. Agus memastikan, pembanguan fisik pasar akan dimulai pada Februari tahun depan.

"Tadi sudah kita sampaikan Insya Allah akhir Februari (2023) sudah mulai dilakukan pembangunan," kata Agus usai audiensi bersama pedagang di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/8).

Saat ditanya alasan revitalisasi mangkrak hingga lima tahun, Agus beralasan, hal itu disebabkan karena Covid-19

dan sejumlah masalah dengan mitra.

"Ya karena memang pandemi. Mitra itu beberapa juga karena kondisi keuangan. Dan kita pun mengingat ini ada masalah hukum dengan mitra yang lama, kita sudah berkoordinasi dan mediasi difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," ujar dia.

Agus mengaku bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi juga telah memerintahkannya agar segera menyelesaikan revitalisasi ini. "Ini sudah sesuai dengan perintah pak gubernur kepada kami untuk segera menyelesaikan pasar Blok VI yang mangkrak ini," sambung Agus.

Sementara menunggu revitalisasi dilanjutkan, Agus juga

berjanji akan membuat tempat penampungan sementara lebih layak bagi pedagang. Pada Rabu (2/8) sore Agus akan mengutus perwakilannya untuk meninjau dan menyediakan fasilitas parkir sebagaimana salah satu tuntutan para pedagang. "Kita juga sudah fasilitasi keinginan dari para pedagang terkait masalah parkir sementara dan tentunya memperbaiki merenovasi TPS-TPS (tempat penampungan sementara) yang sudah mengalami kerusakan," ujar dia.

Pedagang Blok VI Pasar Senen sebelumnya meminta kepastian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya mengenai kepastian revitalisasi pasar.

Tuntutan ini disampaikan

lewat aksi unjuk rasa yang dilakukan 100 orang perwakilan pedagang Blok VI Pasar Senen di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (2/8).

"Kami di sini perwakilan pedagang. Tolong agar pasar kami segera dibangun karena ikhtiar awal kami dipindahkan adalah agar segera dibangun pasar itu. Sudah tahun kelima tidak ada kepastian pembangunan pasar itu," kata Renhard Panjaitan selaku koordinator aksi.

Lima tahun sudah para pedagang ditaruh di tempat penampungan sementara. Padahal, semula pedagang dijanjikan bahwa revitalisasi hanya akan memakan waktu dua tahun. ■ yan

Tarif Pelayanan Puskesmas di Depok Naik, Ini Kata Dinkes

DEPOK (IM) - Tarif pelayanan Puskesmas di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), yang mengalami kenaikan ramai dibahas di media sosial (medsos). Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Depok, Mary Liziawati mengungkapkan alasan kenaikan tarif pelayanan Puskesmas tersebut.

Mary mengatakan kenaikan

itu berdasarkan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 64 tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Depok. Perwal itu diterbitkan pada 31 Juli 2023 yang menyebutkan kenaikan tarif berlaku pada 7 Agustus 2023.

"Perlu saya sampaikan

bahwa Perwal ini penyesuaian tarif kita sering sampaikan penyesuaian tarif ini belum berlaku di 1 Agustus 2023 kemarin. Karena kami sepakat di tanggal 1 sampai 6 Agustus 2023 adalah masa sosialisasi untuk diberikan informasi kepada masyarakat luas. Dan akan kami berlakukan di tanggal 7 Agustus tahun 2023 nah ini mohon untuk

bisa dipahami bersama," ujar Mary kepada wartawan melalui Zoom Meeting, Rabu (2/8).

Mary menjelaskan kenaikan tarif ini disebabkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memiliki regulasi yang mengatur tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Depok yang tertuang dalam Perwal Nomor 61 Tahun 2016. Dia mengatakan penyesuaian tarif dilakukan karena Puskesmas sudah menjadi BLUD.

"Jadi perwal ini terbit tahun 2016 didasari karena Puskesmas sudah menjadi BLUD sehingga perlu ada penetapan tarif. Ketika Puskesmas belum menjadi BLUD ya namanya retribusi, kita menggunakan perda. Jadi sebelum itu, di tahun 2010 kita punya Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan dasar dan tarif retribusi dasar di Puskesmas," ujarnya.

Mary menjelaskan, sebelum menjadi BLUD, Puskesmas masih memberlakukan retribusi berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2010. Saat menjadi BLUD, Puskesmas menggunakan tarif Perwal Nomor 16 Tahun 2016.

"Nah sejak perda maupun dengan perwal, sejak retribusi maupun dengan tarif ini pendaftaran Puskesmas masih Rp 2.000 ini perlu dipahami. Puskesmas saat ini sudah menjadi BLUD, sehingga dengan BLUD, maka diharapkan Puskesmas bisa memenuhi standar biaya operasional yang menjadi beban untuk operasional Puskesmas secara mandiri," ujarnya.

"Diharapkan seperti itu dengan (menjadi) BLUD, tidak menggantungkan kepada APBD. Sehingga dengan tarif retribusi yang belum berubah, kalau kami mengacu kepada perda 2010 tadi, ya

sebelum 2010 juga informasi dari teman-teman Puskesmas, tarifnya juga sudah Rp 2.000," lanjutnya.

Mary menegaskan pihaknya sudah melakukan kajian banding tarif pelayanan kesehatan Puskesmas di sekitar Depok, yaitu Cirebon, Tangsel, Bogor, Bekasi, serta wilayah perbatasan Jakarta Selatan. Hasilnya, tarif pelayanan Puskesmas di Depok paling rendah.

Jadi perlu ada penyesuaian tarif untuk meningkatkan mutu layanan Puskesmas. Serta mendukung atau mendorong masyarakat menggunakan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Berikutnya, untuk mendorong masyarakat supaya mengikuti program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, atau KIS. Karena selama ini masyarakat merasa belum memerlukan karena kalau sakit ke Puskesmas Rp 2.000 kok, sementara kalau sakit parah, dirujuk ke RS, mereka tinggal bansos," ujarnya.

"Padahal secara kemampuan, mungkin untuk mengikuti JKN untuk membayar premi KIS, Rp 35 ribu per bulan, itu bisa. Tapi masyarakat belum memprioritaskan, ini menjadi salah satu pembelajaran kepada masyarakat supaya lebih memerhatikan kesehatan," lanjutnya. ■ yan

DATA UNIT TARIKAN (UTN) PT. SINARMAS HANA FINANCE

Bahwa perjanjian pembiayaan :

No.	Brand, Type, Color & Year	Tax	Transmission	Police Number
1	DAIHATSU B401RS-GMDFJ 1.2 X SIGRA PUTIH 2017	13/09/2019	M/T	B 1558 PIR
2	SUZUKI GC415V -APV DLX MERAH METALIK 2011	12/06/2023	A/T	AA 1593 IT
3	SUZUKI RW 415FX-OVER (4X2) ABU ABU METALIK 2014	22/06/2023	A/T	D 159 R
4	SUZUKI AWI 414 F DX (4X2) ERTIGA ABU ABU METALIK 2013	15/02/2023	M/T	F 1262 HZ
5	SUZUKI RW415F X-OVER 4X2 ORANYE METALIK 2008	11/09/2023	M/T	G 9121 BP
6	NISSAN X TRAIL 2.0 2WD ABU ABU TUA METALIK 2012	10/09/2022	M/T	L 1875 FC
7	TOYOTAKUANG INNOVA V HTAM METALIK 2009	03/12/2022	A/T	L 1429 M
8	TOYOTA AGYA 1.2 G ABU ABU METALIK 2017	19/09/2022	A/T	AD 9485 IU
9	NISSAN GRAND LIVINA X-ABU ABU METALIK 2010	18/04/2023	A/T	D 1183 MX
10	MITSUBISHI Pajero Sport 2.5HP-E (4X2) 5 HITAM MIKA 2014	25/04/2023	A/T	B 2096 KBI
11	MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE (4X2) PUTIH MUTIARA 2018	15/03/2024	A/T	N 1190 AZ
12	DAIHATSU B100RS-GMDFJ (4X2) (AYLA) MERAH SOLID 2015	12/01/2023	M/T	B 2350 TFO
13	DAIHATSU AYLA 1.2 R (B101RS-GMSGJ) ORANGE METALIK 2018	03/10/2023	M/T	B 2097 SYL
14	TOYOTA NEW CAMRY 2.4 V SILVER METALIK 2008	03/04/2023	A/T	B 1796 OP

telah cidera janji, harap hubungi kantor kami paling lambat tanggal 11 Agustus 2023. Bilamana lewat batas waktu, maka kendaraan akan kami jual di perhitungannya kembali.

Horomat Kami PT. SINARMAS HANA FINANCE - CS : (021) 5695 4670



UNJUK RASA PENGUSAHA ANGKOT JAKARTA

Pengusaha mobil angkutan kota (angkot) yang merupakan anggota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (2/8). Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta segera mengoperasikan Angkot MikroTrans trayek Jak 78, Jak 79, dan Jak 107 di wilayah Jakarta Barat karena mobil angkot mereka belum juga beroperasi sejak mulai membayar angsuran pada tahun 2019.

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam rangka pembaruan harta kekayaan PT. PARASAHABAT TRIPUTRA (Dalam Likuidasi) berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan berencana membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham Perseroan yang terdaftar pada buku Perseroan.

Apabila terdapat kreditur yang memiliki keberatan terhadap rencana pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan tersebut dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada Likuidator Perseroan, dengan alamat:

Wisma Staco Lt 7
Jl. Casablanca Kav 18,
Menteng Dalam - Jakarta Selatan

Jakarta, 3 Agustus 2023
RAWAL TIMUR LASUT
Likuidator
PT. PARASAHABAT TRIPUTRA
(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam rangka pembaruan harta kekayaan PT. DWIPILAR PARASAHABAT (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan berencana membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham Perseroan yang terdaftar pada buku Perseroan.

Apabila terdapat kreditur yang memiliki keberatan terhadap rencana pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan tersebut dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada Likuidator Perseroan, dengan alamat:

MENARA KADIN IND LT 23
Jl. HR. RASUNA SAID BLK X-5 No KAV 2-3,
Kuningan Timur - Setiabudi
Jakarta Selatan

Jakarta, 3 Agustus 2023
ARIF RAHMAT
Likuidator
PT. TRIPUTRA PERMATA RAHMAT
(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam rangka pembaruan harta kekayaan PT. DWIPILAR PARASAHABAT (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan berencana membagikan sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham Perseroan yang terdaftar pada buku Perseroan.

Apabila terdapat kreditur yang memiliki keberatan terhadap rencana pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan tersebut dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kepada Likuidator Perseroan, dengan alamat:

MENARA KADIN IND LT 23
Jl. HR. RASUNA SAID BLK X-5 No KAV 2-3,
Kuningan Timur - Setiabudi
Jakarta Selatan

Jakarta, 3 Agustus 2023
RAWAL TIMUR LASUT
Likuidator
PT. DWIPILAR PARASAHABAT
(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Kami Direksi PT SCREENING INDONESIA INTEGR, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perseroan), dengan ini mengumumkan rencana pengalihan sebagian hak atas saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang mengakibatkan adanya pengendalian dalam Perseroan.

Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan rencana pengalihan seluruh hak atas saham tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke alamat kantor Perseroan di South Quarter Building Tower C Level 10, Jalan RA Kartini Kav. 8, Kel. Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang akan dilayani.

Jakarta, 3 Agustus 2023
Direksi
PT SCREENING INDONESIA INTEGR